

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH POLITIK JAWA TENGAH

Dalam bab 2 ini menggambarkan peta orientasi politik masyarakat daerah pemilihan di Jawa Tengah. Untuk menjelaskan hal tersebut setidaknya ada dua bagian untuk mengkajinya. Pertama, sejarah berdirinya Partai Golkar apakah keberadaannya berpengaruh terhadap kontestasi politik di Indonesia. Kedua, Pola rekrutmen caleg Golkar dan kompetisi antar aktor di internal Partai Golkar terdapat di daerah pemilihan ini sebagai sarana untuk memenangkan kontestasi tersebut.

Tujuan bab ini untuk membahas pola rekrutmen calon anggota legislatif dari Partai Golkar, yang dinilai mempunyai elektabilitas dan kompetensi tinggi dalam meningkatkan citra partai. Bagaimana peta politik dan sosiografis di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dimiliki oleh masing-masing kompetitor dalam memperebutkan kursi parlemen di pemilu legislatif tahun 2014 mendatang. Dengan demikian menjadi jelas kandidat seperti apakah calon legislatif, yang mempunyai peluang paling besar untuk memenangkan kompetisi pemilu legislatif tersebut.

2.1. Sejarah Berdirinya Partai Golkar

Partai Golkar yang semula berawal dari berdirinya Sekber Golkar pada tahun 1964 di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar yang didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (Letkol Suhardiman dari Soksi menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda wanita,

sarjana, buruh, tani dan nelayan dalam sekretariat Bersama Golongan Karya). Organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar dikelompokkan berdasarkan kekerajaan ke dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) diantaranya, Kosgoro, Soksi, MKGR, Organisasi Profesi, Hankam, Gakari dan Gerakan Pembangunan untuk menghadapi pemilu 1971.

Dari ketujuh KINO sebagai kekuatan Sekber Golkar pada tanggal 4 Februari 1970 ikut menjadi peserta pemilu, sehingga tahun 1971 berubah menjadi Golkar dan hasilnya diluar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 atau 62, 79 % dari total perolehan suara. Karena adanya aturan Golkar berubah kembali menjadi Partai Golkar, sehingga dalam pemilu berikutnya partai yang berlambang pohon beringin ini tampil sebagai pemenang dan kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Sejalan dengan arus reformasi yang terus bergulir dan turunnya Presiden Soeharto, Partai Golkar yang dibawah kepemimpinan Akbar Tanjung, berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra. Partai Golkar yang ikut dalam pemilu 1999 harus berkompetisi dengan partai baru di era multipartai, namun dalam pemilu pertama di era reformasi Partai Golkar mengalami penurunan suara diperingkat kedua dibawah PDIP. Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul, sehingga pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang dengan 24.480.757 suara atau 21,58 % suara sah. Pada pemilu 2009 suara Partai Golkar turun ke posisi kedua, sehingga pemenang diraih oleh

Partai Demokrat. Namun dalam pemilu 2014 ini perolehan suara masih tetap bertengger di urutan kedua (18.432.312) setelah PDI-P (23.681.471).

Dalam Munas VIII di Pekanbaru Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum menggantikan Yusuf Kalla. Sebagai pemimpin baru partai beringin, Aburizal bertekad memenangkan kembali dalam pemilu, namun sangat disayangkan dalam pemilu tahun 2014 Golkar merosot turun masih menduduki sebagai posisi kedua setelah PDIP. Meski masih nomor dua dalam pertarungan presiden Partai Golkar tidak bisa mencalonkan sendiri, sehingga mendukung dan berkoalisi dengan Partai Gerindra mengusung Parbowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai calon presiden.

2.2. Visi dan Misi Partai Golkar

A. VISI :

Sejalan dengan cita-cita bapak pendiri negara (the founding fathers) kita, bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai Golkar sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka,

egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaannya serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan kita di semua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai Golkar upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

B. MISI

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai Golkar dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni : menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu: Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. Kedua, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki

posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Logo Partai Golkar di Pemilu 2014



Tagline Partai Golkar di Pemilu 2014



2.3. Pola Rekrutmen Calon Legislatif Golkar.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam berbagai tingkatan baik itu pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam mengawasi serta menjalankan proses demokratisasi dan proses penyelenggaraan ketatanegaraan. Lembaga legislatif ini memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi untuk membentuk Undang-undang, fungsi budgeting untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja baik negara maupun daerah, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, agar menjamin terwujudnya hak-hak konstitusional warga negara sehingga prinsip

checks and balances dalam sistem yang demokratis dan konstitusional senantiasa dapat terjaga.

Namun demikian pentingnya peran anggota legislatif bagi keberlangsungan iklim demokrasi di negara kita, membuat proses rekrutmen dari anggota legislasi ini turut menjadi penting, karena baik buruknya anggota legislatif yang duduk di parlemen akan ditentukan oleh proses rekrutmen yang terjadi di internal partai. Oleh karena itu, partai politik memainkan peranan penting dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif (caleg), yang nantinya akan duduk di parlemen karena rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dan keberadaan partai politik.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan rekrutmen politik, yaitu melakukan rekrutmen politik dengan cara memasang iklan terbuka diberbagai media, seperti layaknya sebuah perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja. Cara ini mulai banyak digunakan oleh partai politik untuk menjaring calon legislatif dari luar partai.

Partai Golkar sebagai partai berpengalaman dalam Pemilu tidak sembarangan dalam melakukan rekrutmen politik, sehingga Partai Golkar memiliki kriteria sendiri yang harus dimiliki oleh kader atau calon legislatif. Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/dpp/golkar/1/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota Legislatif DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, adapun kriteria tersebut adalah :

- a. Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif.
- b. Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar.
- c. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT).
- d. Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang.

Kriteria-kriteria di atas bukanlah satu-satunya penyaring bagi para calon legislatif dari Partai Golkar, karena para caleg harus melewati saringan-saringan lain untuk akhirnya dapat maju dalam Pemilu. Saringan berikutnya salah satunya adalah tata cara penentuan daftar calon anggota legislatif Partai Golkar.

1. Tata Cara Penentuan.

Dalam rangka menentukan daftar calon anggota legislatif dilakukan penilaian terhadap kader bakal calon anggota legislatif meliputi aspek; a) pengabdian, b) elektabilitas, c) penugasan sebagai fungsionaris dan d) pendidikan.

a. Aspek Pengabdian

Aspek pengabdian adalah rekam jejak seorang kader dalam Partai Golkar yang meliputi partisipasi seorang kader di saat menjabat sebagai pengurus partai, anggota fraksi, pengurus organisasi sayap, pengurus badan dan lembaga, pengurus ormas yang didirikan maupun yang mendirikan.

b. Aspek Elektabilitas

Aspek elektabilitas adalah peluang keterpilihan seorang kader pada suatu daerah pemilihan dilihat dari sisi basis dukungan massa. Hal ini dinilai pada aspek ini adalah hasil survei elektabilitas terbaru di daerah pemilihan.

c. Aspek Penugasan Fungsionaris.

Penugasan fungsionaris adalah suatu bentuk penugasan yang diberikan kepada setiap fungsionaris partai setelah kader yang bersangkutan mengikuti orientasi fungsionaris. Penugasan fungsionaris dimaksudkan agar tiap-tiap fungsionaris partai Golkar memberikan kontribusi aktif dalam konsolidasi partai (vertikal dan horizontal) memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai, serta mendorong pelaksanaan program karya-kekaryaannya di daerah penugasan masing-masing.

d. Aspek Pendidikan.

Aspek pendidikan adalah pengalaman pendidikan seorang kader meliputi pendidikan formal, nonformal dan pendidikan kepartaian.

2. Tata Cara Pembobotan

Berdasarkan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-227/DPP/GOLKAR/ 1 / 2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota Legislatif DPR-RI, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota Partai Golkar, tata cara pembobotan anggota legislatif terbagi dalam tiga sebagai berikut:

a. Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPR-RI

No	Aspek yang diberi bobot	Prosentase
1.	Pengabdian	40
2.	Elektabilitas	30
3.	Penugasan Fungsionaris	20
4.	Pendidikan	10

b. Tata Cara Pembobotan untuk Calon Anggota DPRD Propinsi

No	Aspek yang diberi bobot	Prosentase
1.	Pengabdian	40
2.	Penugasan Fungsionaris	30
3.	Pendidikan	30

c. Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

No	Aspek yang diberi bobot	Prosentase
1.	Pengabdian	40
2.	Penugasan Fungsionaris	30
3.	Pendidikan	30

3. Tata Cara Penilaian.

a. Pengabdian.

Penilaian pengabdian didasarkan pada rekam jejak dan PD2LT serta posisi saat ini di partai, fraksi, ormas mendirikan dan didirikan, organisasi sayap, Badan lembaga dengan nilai 0-100.

b. Elektabilitas.

Elektabilitas diperoleh dari peringkat hasil survei per daerah pemilihan dengan skala 0-100

c. Penugasan Fungsionaris.

Penilaian penugasan fungsionaris didasarkan pada keberhasilan yang bersangkutan menuntaskan konsolidasi partai, memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai serta mendorong pelaksanaan program karya-kekaryaan di daerah penugasan masing-masing dengan nilai 0-100.

d. Pendidikan

Penilaian pendidikan didasarkan pada stratapendidikan formal dengan nilai

Calon DPR-RI : S 3 = 100, S 2 = 75, S1 = 50

Calon DPRD Propinsi : S 3 = 100, S 2 = 75, S1 = 50, D 3 = 25.

Calon DPRD Kab/Kota : S 3 = 100, S 2 = 75, S1 = 60, D 3 = 40, SMA = 20

Untuk sumber-sumber rekrutmen itu sendiri partai Golkar secara nasional menyebutkan ada 6 (enam) sumber rekrutmen diantaranya sebagai berikut :

1. Kepengurusan partai Golkar seluruh tingkatan
2. Anggota fraksi Partai Golkar DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD-RI
3. Organisasi kemasyarakatan pendiri dan didirikan Partai Golkar.
4. Organisasi sayap Partai Golkar.
5. Pengurus Badan dan Lembaga yang dibentuk Partai Golkar.
6. Tokoh Masyarakat (tokoh agama, akademisi, budayawan dan profesional lainnya) yang memiliki kompetensi dan popularitas.

Tingginya pembobotan aspek pengabdian dalam keputusan DPP berkaitan dengan sumber rekrutmen bakal calon legislatif, dari keenam sumber yang tertuang dalam keputusan tersebut. Namun ada satu sumber yang tidak secara langsung memiliki hubungan dengan Partai Golkar, sedangkan kelima sumber lainnya berasal dari intern partai Golkar. Dengan komposisi ini membuat kader-kader partai Golkar diuntungkan karena partai lebih mengutamakan kadernya untuk ditempatkan baik itu di pusat, propinsi maupun kabupaten/kota.

Meskipun menguntungkan bagi kader Partai Golkar, partai ini juga mempunyai kriteria penilaian tersendiri untuk melakukan seleksi kader-kader yang berkualitas, karena tidak sembarangan kader bisa dengan mudah mendapatkan promosi jabatan untuk menduduki posisi sebagai anggota legislatif. Namun setiap bakal calon anggota legislatif sesuai dengan keputusan DPP Partai Golkar harus melalui serangkaian proses sebelum akhirnya bertarung dalam pemilu. Adapun serangkaian proses tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD propinsi menyampaikan formulir kesediaan, untuk dicalonkan sebagai calon anggota DPRD propinsi kepada seluruh kader fungsionaris yang telah mengikuti orientasi fungsionaris, baik yang diselenggarakan oleh DPP partai Golkar atau DPD partai Golkar Propinsi periode 2009-2015.
- b. Tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Propinsi menetapkan daftar bakal calon dalam daerah pemilihan berdasarkan surat pernyataan kesediaan yang diterima dari fungsionaris pusat/daerah propinsi terkait, sebagaimana dimaksud dalam point (a) di atas.
- c. Daftar bakal calon anggota DPRD Propinsi sebagaimana yang dimaksud pada butir (b) disusun secara Alphabeta dengan memperhatikan keterwakilan 30 persen kader perempuan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh partai.
- d. Daftar bakal calon anggota DPRD Propinsi sebagaimana dimaksud pada butir (b) disusun secara alphabetis dengan memperhatikan keterwakilan kader muda.

- e. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada butir (b) dikirim kepada ketua DPD partai Golkar Kabupaten/Kota untuk diberikan catatan/pertimbangan.
- f. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota memiliki waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima daftar bakal calon dari DPD partai Golkar Propinsi untuk mengembalikan daftar bakal calon dimaksud, disertai catatan/pertimbangan bilamana ada.
- g. Tim seleksi menyusun daftar calon sementara (DCS) berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam keputusan ini.
- h. Dewan pertimbangan DPD partai Golkar propinsi memberikan peretimbangan terhadap DCS yang disusun oleh tim seleksi.
- i. Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud dalam poin (g) dikonsultasikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan DPP partai Golkar.
- j. Setiap calon dalam DCS diminta melengkapi persyaratan administrasi (syarat umum dan syarat khusus) dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- k. Tim seleksi melakukan verifikasi administrasi terhadap calon dalam daftar DCS.
- l. DCS anggota DPRD Propinsi diserahkan oleh DPD Partai Golkar Propinsi ke KPUD Propinsi.
- m. Penerapan Daftar Calon Tetap (DCT) dilakukan oleh DPD partai Golkar Propinsi setelah mendapat masukan dari KPUD Propinsi dengan

sebelumnya mengkonsultasikannya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh DPP Partai Golkar.

Dari serangkaian proses di atas, ada satu proses yang sangat penting dan biasanya menimbulkan pertanyaan masyarakat. Proses itu adalah penyusunan nomor urut daftar calon dalam DCS dan DCT yang disampaikan kepada KPUD. Proses yang sering menjadi pertanyaan masyarakat tersebut, biasanya mempertanyakan kriteria apa yang digunakan oleh partai untuk menentukan seorang kader mendapat nomor peci dan nomor sepatu. Partai Golkar dalam keputusannya mencantumkan beberapa kriteria, yang menjadi pedoman dalam penyusunan nomor urut calon meskipun tidak secara mendetail.

Dalam menentukan nomor urut itu kriterianya sudah jelas, sehingga apa yang dilakukan untuk mencegah munculnya ketidakpuasan dan rasa curiga dari kader-kader yang mungkin mendapatkan hanya memperoleh nomor sepatu. Adapun ketentuan penyusunan nomor urut yang tercantum dalam ketetapan DPP adalah sebagai berikut :

1. Nomor urut dalam daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan keterwakilan 30 persen perempuan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
2. Nomor urut daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan kader muda.
3. Nomor urut dalam daftar calon anggota legislatif, disusun memperhatikan pengurus partai yang aktif.

Selain ketentuan di atas, dalam penentuan DCS dan DCT untuk DPRD Jateng, DPD Propinsi harus memperhatikan pertimbangan dari Ketua DPD partai Golkar Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil evaluasi kinerja kader bersangkutan sebagai Fungsiaris Propinsi, Kabupaten/Kota terkait. Hal ini dilakukan berkaitan dengan kewenangan untuk menetapkan Caleg untuk DPRD Jateng. Untuk lengkapnya wewenang penetapan calon anggota DPRD Jateng adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk melakukan proses seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Propinsi berada pada DPD partai Golkar Propinsi, yang dilaksanakan oleh tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Propinsi.
- b. Tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Propinsi dipimpin oleh Ketua DPD Propinsi dengan anggota-anggota: Ketua Harian (bila ada), sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu daerah terkait, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Ormas (bidang yang ditugasi untuk kerjasama dengan Ormas).
- c. Dalam menetapkan daftar calon anggota DPRD Propinsi (DCS-DCT), DPD partai Golkar Propinsi wajib memperhatikan pertimbangan dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil evaluasi kinerja kader bersangkutan sebagai fungsiaris Propinsi Kabupaen/Kota terkait.

- d. Dewan pertimbangan DPD Partai Golkar Propinsi dapat memberikan pertimbangan terhadap DCS yang telah disusun oleh Tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Propinsi.
- e. Sebelum DPD Partai Golkar Propinsi menetapkan daftar calon anggota DPRD propinsi (DCS-DCT), diharuskan berkonsultasi dengan DPP Partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan selanjutnya dikonsultasikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan DPP Partai Golkar.
- f. Penetapan DCS dan DCT anggota DPRD Propinsi dilakukan oleh Tim seleksi dan dilaporkan dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Propinsi.

2.4. Peta Politik Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pusat budaya kejawaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, namun jika dilihat dari pola orientasi politik pemilihan masyarakat terhadap partai politik memang agak berbeda. Sejak pemilu 1955 dan 1957 PNI dan PKI tampil sebagai dua partai terbesar, sehingga pelaksanaan pemilu 1957 (memilih konstituen) PKI mengalahkan PNI di Jawa Tengah. Meskipun PNI kehilangan dukungan di sebagian besar di Jawa Tengah kecuali di Kabupaten Purworejo, PKI mendapatkan kemenangan mayoritas tunggal di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Sementara partai berbasis Islam Partai NU tampil sebagai partai besar pada pemilu 1955 dan 1957, terutama di wilayah Demak dan Jepara.

Pada masa pemerintahan Orde Baru Partai NU tampil sebagai kompetitor Golkar pada pemilu 1971, yang kemudian telah terjadi fusi partai-partai, sehingga PPP selalu menjadi pemenang kedua sampai dengan pemilu 1997. Meskipun Golkar selama orde baru menang dalam pemilu, namun tidak pernah tampil dengan dukungan rata-rata nasional, seperti contoh;

Wilayah Surakarta cenderung PNI dan PDI

1. Wilayah Pantura cenderung mendukung Partai NU dan PPP
2. Dibeberapa daerah Golkar gagal meraih suara mayoritas tunggal, apalagi tahun 1992 ketika PDI dan PPP mulai bangkit, Golkar kehilangan dukungan 13 persen dibandingkan tahun 1987 atau turun 10 kursi (dari 54 menjadi 44).

Pada tahun 1999 setelah Reformasi :

1. PDI-P sebagai pemenang suara terbanyak di Jawa Tengah, di wilayah eks Karesidenan Surakarta.
2. Sedangkan PAN mendapat dukungan di Kabupaten Klaten dan Solo.
3. PPP kehilangan dukungan besar di Jawa Tengah kecuali di Jepara yang masih meraih suara 44 persen.
4. PKB meraih dukungan kuat di beberapa wilayah pantura dan Kabupaten Magelang.
5. Secara keseluruhan partai berbasis Islam meraih 14 persen atau 3 persen dibawah rata-rata nasional. Namun yang perlu dicatat adalah tingkat dukungan partai Golkar di Provinsi Jawa Tengah, yakni

sekitar 1,5 persen lebih besar di kota dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2.4.1. Peta Sosiografis Provinsi Jawa Tengah.

Mayoritas masyarakat Jawa Tengah secara keagamaan memang sarat dengan tradisi keislaman, namun dilihat dari kekentalannya dapat dipetakan sebagai berikut : jenis subkultur, karakter dan cakupan wilayah.

1. Abangan.

Mempunyai karakter Islam cair yang sangat terbuka dan sinkretik (Islam Jawa/kejawan). Menghindari hal-hal yang bersifat normatif dan concern dalam gerakan kultural. Akomodatif terhadap nilai-nilai dan tradisi lokal seperti takhayul dan khurafat. Cakupan wilayah dari kaum abangan ini meliputi Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, Boyolali, Purwodadi, Blora, Semarang, Kendal, Temanggung, Purworejo, Wonosobo, Batang, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Pemalang, Brebes, Kota Searang, Kota Magelang, Kota Salatiga.

2. Santri.

Islamnya lebih kental dan konservatif. Tradisi keberagamannya bersifat normatif skriptulitik. Memurnikan ajaran Islam dan infiltrasi nilai dan tradisi lokal, seperti takhayul dan khurafat. Mempunyai cakupan wilayah Rembang, Kudus, Jepara, Demak, Pekalongan, Kota Pekalongan.

3. Abangan-Santri.

Karakternya secara teritorial berada dalam daerah yang sama tetapi kultur keagamaannya berbeda. Terjadi akulturasi atau perpaduan antara tipe

keagamaan abangan dan santri. Akomodatif terhadap masing-masing nilai kedua entitas abangan dan santri. Mempunyai cakupan wilayah Kabupaten Magelang, Kebumen, Pati, Tegal dan Kota Tegal.

Walaupun keseluruhan masyarakat Jawa Tengah secara umum dapat dikategorikan sebagai “orang jawa /wong jowo” dari aspek etnografis, tetapi dalam mozaik budayanya terdiri dari berbagai kultur yang beragam. Subkultur yang memilah masyarakat Jawa Tengah adalah :

1. Subkultur Mataraman.

Secara historis dipengaruhi oleh struktur dan kultur Keraton Mataraman (Solo dan Yogya). Dalam memegang tradisi ajaran Jawa bersifat feodalistik dan konservatif, sehingga secara struktural masyarakat terdiferensiasi secara hirarkhis dalam dua kelas sosial, yaitu golongan “Darah Biru” (ningrat, priyayi) dan “Rakyat Jelata” (wong cilik). Mempunyai otoritas kejawaannya relatif kental dan survive dalam proses akulturasi dengan entitas budaya dari luar. Sumber ekonomi dan budayanya berdasarkan pada sektor agraris. Cakupan wilayahnya Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, Boyolali, Grobogan, Blora, Semarang, Kendal, Temanggung, Magelang, Purworejo, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga.

2. Subkultur Banyumasan.

Relatif tidak terlalu terdeterminasi dari pengaruh budaya keraton (Solo/Yogya), dengan kultur kejawennya relatif cair, egaliter dan terbuka.

Tidak ada hirarki kelas dan status sosial yang mencolok antara kelas ningrat dan wong cilik. Mempunyai logat bahasa yang dipakai menghentak pada pengucapan akhir ‘ngapak-ngapak’. Namun secara teritorial terbagi dua, yaitu bagian barat selatan Jawa Tengah dan bagian tengah Jawa Tengah. Sumber ekonomi dan budayanya berdasar pada sektor agraris. Mempunyai cakupan wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Wonosobo.

3. Subkultur Pesisir Wetan (Pesisir Timur).

Secara historis terpengaruh oleh kerajaan Demak dan tradisi Walisongo. Kultur Kejawaannya sangat terbuka, cair dan dinamis. Struktur hirarkhis tidak berdasar priyayi wong cilik, tetapi berdasar hubungan kiaisantri. Mempunyai logat bahasa dan tradisinya bersifat lugas dan kasar. Menerima berbagai akulturasi budaya dari entitas lain, sehingga sumber ekonomi dan budayanya berdasar pada sektor kelautan. Mempunyai cakupan wilayah Kabupaten Rembang, Pati, Kudus, Jepara dan Demak.

4. Subkultur Pesisir Kilen (Pesisir Barat).

Relatif tidak terpengaruh secara nyata dari bias kerajaan pesisir wetan maupun Mataraman, namun kultur kejawaannya sangat terbuka, cair dan dinamis. Sedangkan struktur masyarakatnya bersifat egaliter dan paralel, menerima ragam akulturasi budaya dari berbagai entitas lain. Sumber ekonomi dan kulturenya berdasar pada sektor kelautan dan merkantilis. Mempunyai cakupan wilayah Kabupaten Brebes, Tegal, Peralang, Pekalongan, Batang, Kota Tegal, Kota Pekalongan.

2.5. Daerah Pemilihan di Jawa Tengah

Pelaksanaan pemilu tahun 2014 untuk DPRD Jawa Tengah terbagi menjadi sepuluh daerah pemilihan (dapil) dengan total jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 100 kursi. Sedangkan pembagian dapil untuk pemilihan DPRD tingkat Provinsi di Jawa Tengah, adalah sama dengan pembagian daerah pilihan (Dapil) untuk pemilihan umum DPR RI. Berikut ini adalah tabel pembagian daerah pemilihan di Jawa Tengah.

**Tabel 2.1 Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah
dalam Pileg 2014**

DAERAH PEMILIHAN	WILAYAH KABUPATEN/KOTA
Jawa Tengah I	Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal
Jawa Tengah II	Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
Jawa Tengah III	Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang
Jawa Tengah IV	Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri
Jawa Tengah V	Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali
Jawa Tengah VI	Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung
Jawa Tengah VII	Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga
Jawa Tengah VIII	Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah IX	Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes
Jawa Tengah X	Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang

Sumber data KPU Provinsi Jawa Tengah.